



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2022-2023
Masa Persidangan	: 1
Rapat Ke	: 20
Jenis Rapat	: Rapat Kerja.
Dengan	: Menteri Agama RI, Menteri Sosial RI, Menteri PPPA RI, dan Kepala BNPB RI.
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Rabu, 21 September 2022.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: Penyesuaian RKA KL Tahun Anggaran 2023 Sesuai Hasil Badan Anggaran.
Ketua Rapat	: Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 25 dari 51 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 5 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Menteri Agama RI Beserta Jajaran. 4. Menteri Sosial RI Beserta Jajaran. 5. Menteri PPPA RI Beserta Jajaran. 6. Kepala BNPB RI Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.37 WIB dan dinyatakan Terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, Dr. H. Ashabul Kahfi, M.Ag dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H.TB.Ace Hasan Syadzily, M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas

Sidik, MPA. dan Wakil Ketua H. Marwan Dasopang, M.Si, sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI bersama Menteri Agama RI dengan agenda: **“Penyesuaian RKA-K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI”**, disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui pagu anggaran Kementerian Agama RI tahun 2023 sesuai dengan hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp70.447.597.649.000,- (*Tujuh Puluh Triliun Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Rupiah*), dengan rincian berdasarkan Unit Eselon I sebagai berikut:

No	Unit Eselon I	Jumlah (dalam ribu rupiah)
1	Sekretariat Jenderal	30.133.067.101
2	Inspektorat Jenderal	172.213.825
3	Ditjen Bimas Islam	2.250.382.629
4	Ditjen Pendidikan Islam	33.907.945.830
5	Ditjen Bimas Kristen	775.512.967
6	Ditjen Bimas Katolik	321.065.730
7	Ditjen Bimas Hindu	452.782.469
8	Ditjen Bimas Buddha	193.152.743
9	Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah	1.271.240.489
10	Badan Litbang dan Diklat	633.634.057
11	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal	336.599.809
Total		70.447.597.649

2. Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Agama RI, Kementerian Keuangan dan Bappenas, serta Kementerian Dalam Negeri RI dalam rangka konsolidasi anggaran Kementerian Agama RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Agama RI untuk menindaklanjuti masukan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI antara lain sebagai berikut:

- a. Mendorong Kementerian Agama RI untuk mengkomunikasikan kepada Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran untuk pendidikan madrasah, pesantren, pendidikan agama dan keagamaan lainnya.
- b. Mendorong Kementerian Agama RI untuk meningkatkan sosialisasi mengenai keluarga sakinah dan undang-undang yang terkait produk halal, serta Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.
- c. Mendorong Kementerian Agama RI untuk merealisasikan Dana Abadi Pesantren.
- d. Mendorong Kementerian Agama RI untuk meningkatkan Direktorat Pesantren menjadi Direktorat Jenderal.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Sosial RI dengan agenda **“Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI”** dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Sosial RI Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp78.179.586.686.000,- (*Tujuh Puluh Delapan Triliun Seratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

<u>UNIT</u>	<u>PAGU ANGGARAN</u>	<u>PAGU ALOKASI ANGGARAN</u>
<u>Sekretariat Jenderal</u>	<u>756.421.095.000</u>	<u>756.421.095.000</u>
<u>Inspektorat Jenderal</u>	<u>47.026.464.000</u>	<u>47.026.464.000</u>
<u>Ditjen Rehabilitasi Sosial</u>	<u>1.228.603.054.000</u>	<u>8.921.754.053.000</u>
<u>Ditjen Pemberdayaan Sosial</u>	<u>30.566.673.054.000</u>	<u>52.065.872.270.000</u>
<u>Ditjen Linjamsos</u>	<u>45.580.862.145.000</u>	<u>16.388.512.804.000</u>
<u>TOTAL</u>	<u>78.179.586.686.000</u>	<u>78.179.586.686.000</u>

2. Komisi VIII DPR RI mendukung Kementerian Sosial RI untuk penambahan anggaran tahun 2023 sebesar Rp10.312.880.587.500,- (*Sepuluh Triliun Tiga Ratus Dua Belas Miliar Delapan Ratus Delapan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*) sebagai berikut:

NO	UNIT	KEGIATAN	TARGET	SATUAN	INDEKS	ANGGARAN
1.	Ditjen Rehabilitasi Sosial	Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) Anak Yatim Piatu (selama 12 bulan @Rp200.000,- perbulan)	946.863	Orang	2.400.000	2.272.471.200.000
		Permakanan bagi Lanjut Usia (selama 365 hari @Rp21.000,- per hari)	334.011	Orang	7.665.000	2.560.194.315.000
		Permakanan bagi Disabilitas (selama 365 hari @Rp21.000,- per hari)	98.934	Orang	7.665.000	758.329.110.000
		Alat Bantu Aksesibilitas	5000	Unit	34.000.000	170.000.000.000
2.	Ditjen Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rumah Sejahtera Terpadu	100.000	KPM	20.000.000	2.000.000.000.000
		Bantuan Penanganan Korban Bencana Alam				350.496.500.000
		Bantuan Penanganan Korban Bencana Sosial				50.290.000.000
3.	Ditjen Pemberdayaan Sosial	Pahlawan Ekonomi Nusantara	250.000	KPM	5.000.000	1.250.000.000.000
Biaya Operasional						901.099.462.500
TOTAL						10.312.880.587.500

3. Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian Sosial RI, Kementerian Keuangan dan Bappenas dalam rangka konsolidasi anggaran Kementerian Sosial RI.
4. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Sosial RI agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Memastikan penyaluran BLT BBM dapat dilakukan secara tepat sasaran sehingga tidak menimbulkan gejolak di tengah masyarakat.
 - b. Perbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) secara terus-menerus dengan melibatkan semua *stakeholders* agar penyaluran bantuan sosial tepat sasaran, tepat nilai dan tepat waktu.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan agenda "**Penyesuaian RKA- K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI**" dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI sebesar Rp.288.403.485.000,- (*Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Miliar Empat Ratus Tiga Juta Empat Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*), Rincian Pagu Anggaran Menurut Satuan Kerja Tahun 2023 yang terdiri dari:

(dalam ribuan rupiah)

No	Satuan Kerja	Program Dukungan Manajemen			Program KGPPA (Non Operasional)	TOTAL
		Operasional	Non Operasional	Jumlah		
1	Sekretariat Kementerian	112.682.349	28.768.098	141.450.447	-	141.450.447
2	Deputi Bidang Kesetaraan Gender	2.760.382	1.139.618	3.900.000	20.990.000	24.890.000
3	Deputi Bidang Pemenuhan Hak	2.348.278	1.651.722	4.000.000	20.100.000	24.100.000

No	Satuan Kerja	Program Dukungan Manajemen			Program KGPPA	TOTAL
	Anak					
4	Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat	2.167.046	500.000	2.667.046	10.729.117	13.396.163
4	Deputi Bidang Perlindungan Hak Perempuan	2.970.262	1.250.000	4.220.262	28.800.960	33.021.222
6	Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak	4.234.636	900.000	5.134.636	32.400.885	37.535.521
7	Komisi Perlindungan Anak Indonesia	8.457.123	1.755.005	10.212.128	3.798.004	14.010.132
		135.620.076	35.964.443	171.584.519	116.818.966	288.403.485

2. Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan Kementerian PPPA RI, Kementerian Keuangan dan Bappenas, dalam rangka konsolidasi anggaran Kementerian PPPA RI.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar menindaklanjuti pandangan dan pendapat Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan partisipasi media komunikasi dalam rangka literasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap berbagai program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
 - b. Meningkatkan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak menjadi garda terdepan dalam menyikapi dan menindaklanjuti persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
 - c. Mensosialisasikan UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) secara intensif ke berbagai pemangku kepentingan dan mempercepat terbitnya PP dan Perpres sebagai turunan dari UU di atas.
 - d. Memaksimalkan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri agar meningkatkan peran pemerintah daerah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Pada Rapat Kerja Komisi VIII DPR RI dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dengan agenda membahas **“Penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2023 sesuai Hasil Pembahasan dari Badan Anggaran DPR RI”** disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI dapat menyetujui Pagu Anggaran BNPB Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan hasil pembahasan dari Badan Anggaran

DPR RI sebesar Rp1.036.186.769.000 (*Satu Triliun Tiga Puluh Enam Miliar Seratus Delapan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

NO	UNIT KERJA ESELON I	PAGU ANGGARAN 2023
I	PROGRAM KETAHANAN BENCANA	717.760.256.000
1	DEPUTI BIDANG SISTEM DAN STRATEGI	16.850.000.000
2	DEPUTI BIDANG PENCEGAHAN	340.502.756.000
3	DEPUTI BIDANG PENANGANAN DARURAT	265.550.000.000
4	DEPUTI BIDANG REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI	20.550.000.000
5	DEPUTI BIDANG LOGISTIK DAN PERALATAN	23.500.000.000
6	PUSDATINKOM	21.897.500.000
7	PUSDALOPS	28.910.000.000
II	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN	318.426.513.000
8	PUSDIKLAT PB	14.685.842.000
9	SEKERTARIAT UTAMA	290.240.671.000
10	INSPEKTORAT UTAMA	13.500.000.000
GRAND TOTAL		1.036.186.769.000

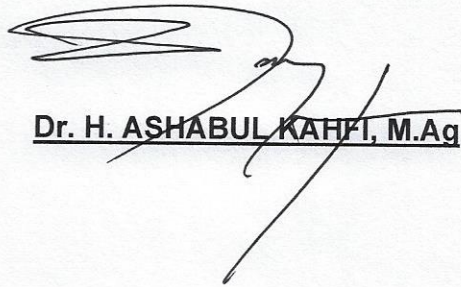
2. Komisi VIII DPR RI akan menyelenggarakan Rapat Kerja Gabungan antara Komisi VIII DPR RI dengan BNPB, Kementerian Keuangan dan Bappenas, dalam rangka konsolidasi anggaran BNPB.
3. Komisi VIII DPR RI meminta Kepala BNPB untuk sungguh-sungguh memperhatikan dan menindaklanjuti pandangan Pimpinan dan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan kementerian lembaga terkait khususnya KemenPUPR dalam penanggulangan bencana khususnya bencana banjir tahunan yang sering terjadi di berbagai daerah.
 - b. Melaksanakan secara intensif program sosialisasi dan mitigasi bencana di berbagai daerah dalam rangka kesiapsiagaan bencana sebagai upaya preventif dalam meminimalisir risiko masyarakat terdampak bencana.

- c. Agar perencanaan program Penanggulangan Bencana BNPB difokuskan berdasarkan database peta daerah rawan bencana yang dimiliki BNPB sehingga bisa lebih efektif dan efisien.
- d. Mendorong peran BNPB untuk melakukan penguatan kelembagaan untuk merumuskan standar kerja dan standar minimal prosedur dalam pelaksanaan penanggulangan bencana, baik pada aspek SDM, manajemen, keuangan, teknologi dan lainnya.

III. PENUTUP

Rapat ditutup pukul 13.26 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



Dr. H. ASHABUL KAHFI, M.Ag